



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERDAGANGAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2023. Akhirnya semoga LKIP Tahun anggaran 2023 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan Good Governance yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua. Amin Yaa Rabbal Aalamin

Rantau, Februari 2024

Kepala Dinas Perdagangan



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M. IP
NIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1. Kepala Dinas Perdagangan	3
2. Sekretaris Dinas Perdagangan.....	4
3. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan	6
4. Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan	7
5. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.....	8
6. Kelompok Jabatan Fungsional	9
B. Aspek Strategis Organisasi	10
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi.....	10
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Sebelumnya	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama	14
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
1. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023	34
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun	

2022	46
3. Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah	50
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	52
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel 2.2	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2023	25
Tabel 3.1	Capaian Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2023	35
Tabel 3.1.1	Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan.....	37
Tabel 3.1.2	Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Pengembangan Saran Distribusi Perdagangan	38
Tabel 3.1.3	Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Kemetrolologi dan Pengawasan Perdagangan	45
Tabel 3.2	Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022	47
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra ...	50
Tabel 3.4	Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) Tahun 2023
2. Rekapitulasi RDDK dan Realisasi Serapan Pupuk Tahun 2023
3. Perhitungan Koefisien Variasi Harga Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melaksanakan 7 program dengan 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.891.441.047,00 realisasi Rp 9.294.888.008,90 (85,34%) dengan sumber dananya dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan, juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strengths*) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin berdasarkan capaian indikator kinerja utama Dinas Perdagangan yaitu Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan tingkat capaian 98,34% dan persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dengan tingkat capaian 97,60% sehingga dapat dikategorikan Baik, dengan realisasi keuangan tidak mencapai 100% yakni hanya mencapai 85,34%.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan khususnya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan dalam menilai pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2023.

Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini ada kekurangan yang selalu kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

BAB



PENDAHULUAN

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja (RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

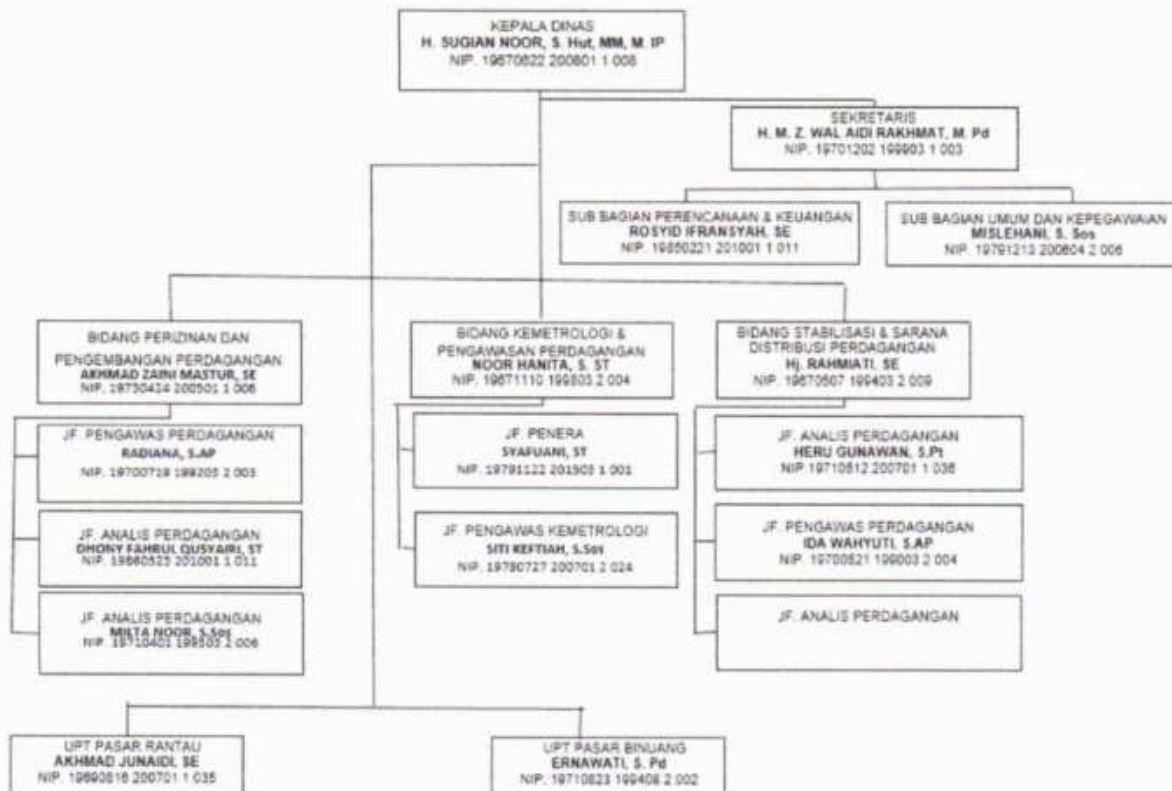
A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok "menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perdagangan".Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b) pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e) pengelolaan kesekretariatan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN



1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait urusan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis Bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan, Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan, Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan,;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan perizinan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan, Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan, Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

2. Sekretariat Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyerat;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ;

- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari :

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :** mempunyai tugas pembantuan mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha perdagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pelaku Usaha Pedagangan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perdagangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan.

Unsur-unsur Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- b) Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan perdagangan; dan
- c) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan.

4. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrologian dan pengawasan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Kemetrologian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pengawasan Perdagangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian

pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah;

Unsur-unsur Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Kemetrolagian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kemetrolagian; dan
- b) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengawasan Perdagangan.

5. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi barang pokok dan penting.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian stabilitas barang pokok dan penting;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

Unsur-unsur Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
- c) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi stabilisasi barang pokok dan penting.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin menemukan potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan;
4. Peningkatan biaya operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan perdagangan;
6. Terbukanya pasar luar negeri merupakan peluang untuk memasarkan komoditi ekspor Kalimantan Selatan yang didukung oleh SDA yang ada.
7. Kecenderungan meningkatnya investasi dan meningkatnya SDM melalui pelatihan dan kelembagaan mendorong tumbuhnya industry yang kompetitif dan bersaing;
8. Adanya kebijakan dari pemerintah untuk perbaiki fasilitas sarana dan prasarana pasar daerah;
9. Mayoritas pelaku usaha perdagangan sudah mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan usahanya.

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahnya SDM pelaksana yang berkualitas;
2. Masih lemahnya SDM Aparatur dalam memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Masih kurangnya operator komputer terampil di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta kurangnya pegawai pada Dinas Perdagangan Kab. Tapin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang;
4. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
5. Masih rendahnya pengembangan usaha pada sektor Perdagangan;
6. Masih beredarnya barang atau produk kadaluarsa yang tidak layak jual di Kabupaten Tapin;
7. Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan perdagangan di daerah;
8. Perlu dibangun UPTD Meterologi pengujian alat ukur takar timbang dan penyediaan aparatur penera.
9. Perlunya dirancang perda di bidang Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji.
10. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Tera/ Tera Ulang Peralatan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
11. Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Tapin.
12. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di lingkungan pasar untuk mentaati peraturan dan ketertiban dipasar.
13. Masih lemahnya Pengawasan distribusi barang pokok dan penting dan pengendalian harga.

14. Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
15. Perlunya Percepatan pembangunan atau revitalisasi sarana dan pembinaan dibidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan;
16. Perlunya data dan informasi kepada pelaku usaha tentang wajib daftar perusahaan dan syarat-syaratnya.
17. Belum optimalnya promosi produk lokal unggulan keluar daerah.
18. Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Tapin.

Potensi dan permasalahan ini menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk tahun-tahun berikutnya.

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

NOMOR	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	71,26	BB
2	2019	72,76	BB
3	2020	73,68	BB
4	2022	71,75	BB

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Dinas Perdagangan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2020 sebagai berikut:

NOMOR	SARAN/REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Pengukuran Kinerja agar mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi	Akan akan mempengaruhi penyesuaian refocusing
2	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Akan Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/ Internasional
3	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)	Dokumen Laporan Kinerja sudah menginfokan perbaikan dan penyempurnaan kinerja
4	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Akan mengupayakan laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
5	Evaluasi Akuntabel Kinerja Internal agar menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Saat ini evaluasi akuntabel kinerja internal dilakukan dengan rapat internal monitoring dan evaluasi kinerja

BAB

**PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

A. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor;
2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis

untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan, jika ditemukan ketidak berhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi namun pada saat tahun berjalan ada beberapa indikator mengalami perubahan berdasarkan hasil asesensi. Uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dan penjelasan/perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator		
Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Mengindikasikan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	semakin besar peran pelaku usaha Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor akan memberikan kontribusi positif terhadap perdagangan PDRB	Jumlah pelaku usaha tahun berjalan (n) – Jumlah pelaku usaha tahun lalu (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha tahun lalu (n-1)	Kepala Dinas	Laporan data pelaku usaha
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	Mengindikasikan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	semakin besar Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi akan memberikan kontribusi positif terhadap perdagangan PDRB	Jumlah sarana distribusi perdagangan kondisi baik tahun (n) – Jumlah sarana distribusi perdagangan kondisi baik tahun lalu (n-1) dibagi Jumlah sarana distribusi perdagangan kondisi baik tahun lalu (n-1)	Kepala Dinas	Laporan data sarana distribusi perdagangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Mengindikasikan akuntabilitas kinerja SKPD	semakin tinggi nilai AKIP maka menunjukkan akuntabilitas kinerja semakin bagus	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Dinas	LHE Disdag
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Mengindikasikan Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	semakin tinggi IP ASN maka menunjukkan profesionalisme asn perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Kepala Dinas	IP ASN Disdag

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Penanggung Jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator		
Meningkatnya tertib usaha perdagangan	Tingkat tertib usaha	kesadaran pelaku usaha untuk tertib dengan memiliki izin usaha	untuk mengetahui pelaku usaha untuk tertib dengan memiliki izin usaha yang ada di kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Berizin / jumlah pelaku usaha dikabupaten tapin yang terdata x100%	Kabid P3	
Meningkatnya volume penjualan produk lokal	pertumbuhan penjualan pelaku usaha lokal	Mengindikasikan Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha lokal pada tahun berjalan	Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha lokal pada tahun berjalan	$r = \frac{S(N) - S(N-1)}{S(N-1)} \times 100\%$ dimana : r = Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha lokal S_n = penjualan pelaku usaha lokal tahun berjalan $s(n-1)$ = penjualan pelaku usaha lokal tahun sebelumnya	Kabid P3	
Meningkatnya pemanfaatan gudang dengan resi gudang (SRG)	Persentase resi gudang yang diterbitkan	Mengindikasikan Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang	Mengetahui Pertumbuhan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Tapin		Kabid P3	
Terlaksananya Sosialisasi perizinan usaha	Persentase peserta dengan nilai post test > pre test	mengindikasikan pengetahuan peserta sosialisasi tentang izin usaha	untuk mengetahui peserta pengetahuan setelah dilakukan sosialisasi	peserta dengan nilai post test > pre test dibagi jumlah peserta sosialisasi x 100%	JF. Analisis Perdagangan	
Terlaksananya fasilitasi proses perizinan pelaku usaha	persentase perizinan yang diterbitkan	pelaku usaha yang difasilitasi untuk membuat izin	untuk memfasilitasi pelaku usaha yang membuat izin	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi membuat izin / jumlah pelaku usaha yang difasilitasi x100%	JF. Analisis Perdagangan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator		
Terlaksananya fasilitas promosi produk lokal	Peningkatan penjualan produk yang dipromosikan	Mengindikasikan Pertumbuhan produk yang dipromosikan pada tahun berjalan	Mengindikasikan Pertumbuhan produk yang dipromosikan pada tahun berjalan	$r = \frac{S(N) - S(N-1)}{S(N-1)} \times 100\%$ dimana : r = pertumbuhan Penjualan produk yang dipromosikan $s(n)$ = Penjualan produk yang dipromosikan tahun berjalan $s(n-1)$ = Penjualan produk yang dipromosikan tahun sebelumnya	JF. Analis Perdagangan	
Terlaksananya pembinaan pemasaran produk	Peningkatan penjualan pada pelaku usaha yang dibina	Mengindikasikan Pertumbuhan Pelaku Usaha yang dibina pada tahun berjalan	Mengindikasikan Pertumbuhan Pelaku Usaha yang dibina pada tahun berjalan	$r = \frac{S(N) - S(N-1)}{S(N-1)} \times 100\%$ dimana : r = Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina S_n = penjualan pelaku usaha yang dibina tahun berjalan $s(n-1)$ = penjualan pelaku usaha yang dibina tahun sebelumnya	JF. Analis Perdagangan	
Terlaksananya sosialisasi sistem resi gudang	Persentase peserta sosialisasi yang akan menyimpan di gudang	Mengindikasikan persentase petani yang menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG)	Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) maka meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan dalam daerah	$\text{Jumlah peserta yang menyimpan} / \text{jumlah peserta sosialisasi} \times 100\%$	JF. Analis Perdagangan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator		
Terlaksananya pengawasan tertib usaha	Persentase pengawasan izin usaha	semakin sering dilaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin maka akan meningkatkan tingkat tertib usaha	monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	jumlah pelaksanaan pengawasan/ target pengawasan x 100%	JF. Pengawas Perdagangan	
Terlaksananya pengawasan resi gudang	Persentase pengawasan resi gudang	untuk memastikan pengelolaan sistem resi gudang berjalan dengan baik dan lancar	monitoring dan pengawasan atas pengelolaan sistem resi gudang (SRG)	jumlah pelaksanaan pengawasan/ target pengawasan x 100%	JF. Pengawas Perdagangan	
Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrologian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	Indeks tertib ukur merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian alat ukur yang digunakan di masyarakat	untuk mengetahui indeks tertib ukur dikabupaten	(Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan x (68,4)) + (Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku x (31,6))	Kabid KP2	Laporan UTTP & Laporan BDKT
Meningkatnya pengawasan kemetrologian	Persentase Lanjut pengawasan UTTP	semakin sering melaksanakan Pengawasan terhadap alat UTTP maka akan meningkatkan tertib ukur	Pengawasan terhadap alat UTTP untuk meningkatkan tertib ukur	Jumlah laporan hasil pengawasan / tindaklanjut hasil pengawasan x 100%	JF. Pengawas Kemetrologi	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator		
	Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan	semakin banyak yang sesuai akan meningkatkan capaian kesesuaian BDKT dengan ketentuan	untuk mengetahui kesesuaian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	Jumlah sampel yang sesuai aturan BDKT / jumlah sampel yang dicoba x 100%	JF. Pengawas Kemetrologi	
Terlaksananya pembinaan kemetrolagian	Persentase peserta pembinaan yang tertib ukur	pembinaan pengetahuan tentang kemetrolagian	untuk mengetahui hasil pembinaan tentang kemetrolagian	Jumlah peserta binaan yang tertib ukur/ peserta yang dibina x100%	JF. Pengawas Kemetrologi	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, dan Timbang Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	Mengindikasikan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang mempunyai tanda tera sah	Semakin banyak alat ukur, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang mempunyai tanda tera sah maka terjaminnya kebenaran pengukuran, kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar ukuran, metode pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah tahun berjalan / Potensi Alat UTTP tahun berjalan x 100 %	JF. Penera	
Terlaksananya Tera/ Tera Ulang Alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera sesuai standard	Menggambarkan Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	semakin banyak alat UTTP yang ditera maka terjaminnya keakuratan alat tersebut	alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertera sah / alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera x100%	JF. Penera	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Rumus Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator				
Terlaksananya kalibrasi peralatan standard kemetrologian	Persentase kemetrologian yang mendapat sertifikat kalibrasi	menggambarkan alat standar kemetrologian yang sudah dikalibrasi	untuk mengukur tingkat akurasi alat standar UTPP yang akan dilakukan tera/tera ulang maka diperlukan kalibrasi		Jumlah alat standar UTPP yang sudah dikalibrasi / jumlah alat standar UTPP yang dimiliki x 100%	JF. Penera	
Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pasar	Hasil SKM menggambarkan kepuasan pedagang	Mengetahui tingkat kepuasan pedagang atas pelayanan yang diberikan pemerintah		Hasil Survey Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kabid S2DP	Hasil survey
Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga	Variasi Harga barang pokok dan penting	Mengetahui tingkat kenaikan harga barang pokok dan penting		Variasi Harga Tertinggi	Kabid S2DP	Hasil Pendataan Harga Bapok
Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	Mengindikasikan kondisi bangunan pasar yang baik	Bangunan pasar yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli		jumlah bangunan pasar yang baik / jumlah bangunan pasar di kabupaten x 100%	Kabid S2DP	Laporan data sarana distribusi perdagangan
Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	Mengindikasikan keberhasilan dalam retribusi pasar yang merupakan sumber PAD	Mengetahui keberhasilan dalam mencapai target pemasukan retribusi pasar sebagai PAD		Realisasi Retribusi Pasar / Target x 100%	Kabid S2DP	Laporan Rekap Retribusi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Rumus Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator				
Optimalnya penataan pedagang dalam pemanfaatan toko di pasar	Persentase toko yang dimanfaatkan	semakin banyak toko yang dimanfaatkan maka akan meningkatkan perdagangan daerah	menggambarkan pemanfaatan toko untuk optimalisasi pengelolaan pasar	jumlah yang dimanfaatkan/ jumlah toko yang tersedia x 100%	JF. Analisis Perdagangan		
Terlaksananya registrasi ulang atas pemanfaatan toko	Persentase data pemanfaatan toko yang aktif	semakin banyak penyewa toko yang aktif berjualan maka akan meningkatkan perdagangan daerah	menggambarkan penyewa toko yang aktif berjualan	jumlah penyewa toko yang aktif membayar retribusi pasar / jumlah penyewa toko x 100%	JF. Analisis Perdagangan		
Tersedianya informasi harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase laporan harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Memberikan informasinya hari yang digunakan dalam monitoring harga	Laporan Informasi Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting yang disajikan dan diupdate setiap harinya dapat memberikan informasi terkini bagi masyarakat	Jumlah hari laporan harga informasi kebutuhan pokok dan bahan penting / Jumlah Target hari laporan x 100 %	JF. Analisis Perdagangan		
Tersedianya sarana informasi tentang harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase sarana informasi terpasang di pasar yang diperbaharui	menggambarkan sarana berupa papan informasi harga barang pokok yang tersedia di pasar terus update	tersedianya sarana papan informasi harga barang pokok yang tersedia di pasar dalam rangka untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan barang pokok dan penting yang ingin dibeli oleh masyarakat	jumlah update harga / dipapan informasi / jumlah laporan informasi harga x 100%	JF. Analisis Perdagangan		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Rumus Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator				
Terlaksananya pasar murah	Persentase pasar murah yang dilaksanakan yang tempat sasaran	menggambarkan pelaksanaan pasar murah	pasar murah bertujuan untuk menekan harga barang pokok dan penting yang mengalami kenaikan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah tepat sasaran / Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah x 100%	JF. Analis Perdagangan		
Terlaksananya koordinasi ke Penyedia untuk Pelaksanaan Pasar murah	PersentaseTindak Lanjut koordinasi Penyedia Pasar Murah yang terlaksana	memastikan terlaksananya koordinasi kepenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pasar murah	dengan adanya penyedia maka pasar dapat terlaksana dengan lancar dan baik	Jumlah Koordinasi dengan Penyedia Pasar Murah yang disepakati / Koordinasi dengan Penyedia Pasar Murah x 100%	JF. Analis Perdagangan		
terlaksananya pemeliharaan pasar	persentase pasar yang dipelihara	Jumlah Sarana dan prasarana pelihara	pemeliharaan dan pembangunan pasar bisa meningkatkan kelayakan pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara / jumlah sarana distribusi perdagangan yang perlu dipelihara x 100%	JF. Analis Perdagangan		
Terlaksananya pengawasan sarana pasar	persentase tindak lanjut atas pengawasan sarana pasar	mengetahui terlaksananya pengawasan sarana pasar	dengan melaksanakan koordinasi pengawasan sarana pasar maka akan mengoptimalkan fasilitas sarana distribusi perdagangan	jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana pasar /jumlah pengawasan sarana pasar x 100%	JF. Pengawas Perdagangan		
Terlaksananya koordinasi kebersihan dan keamanan	Persentase tindak lanjut koordinasi kebersihan dan kamanan	mengetahui terlaksananya koordinasi dan keamanan lingkungan pasar	dengan melaksanakan koordinasi terhadap petugas kebersihan dan keamanan pasar maka akan mengoptimalkan fasilitas sarana distribusi perdagangan	jumlah tindaklanjut koordinasi kebersihan dan keamanan /jumlah koordinasi kebersihan dan keamanan x 100%	JF. Pengawas Perdagangan		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Rumus Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator				
Terlaksananya pengawasan atas pemungutan retribusi pasar	Persentase tindak lanjut pengawasan pemungutan retribusi pasar	menggambarkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi pasar	dengan dilakukannya pengawasan maka akan mengurangi penyalahgunaan terhadap hasil pungutan retribusi pasar	tindaklanjut pengawasan terhadap petugas pungut / jumlah pengawasan terhadap petugas pemungut ditahun berjalan x 100%	JF. Pengawas Perdagangan		
Meningkatnya persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase realisasi bersubsidi kinerja pupuk	Memberikan informasi Kinerja Realisasi Pupuk	Berapa Realisasi Kebutuhan Pupuk Kelompok Tani	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi/ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK) x 100 %	JF. Pengawas Perdagangan		
Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	menggambarkan pengawasan terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	dengan dilakukannya pengawasan maka akan mengurangi penyalahgunaan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	jumlah pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran / target pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran x 100%	JF. Pengawas Perdagangan		

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, berikut ikhtisar perjanjian kinerja berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja maka dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perdagangan tahun 2023.

Namun pada saat tahun berjalan ada beberapa indikator mengalami perubahan berdasarkan hasil asesensi. Adapun Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
DINAS PERDAGANGAN			
1	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	10%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	60
BIDANG PERIZINAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			
1	Meningkatnya tertib usaha perdagangan	Tingkat tertib usaha	60%
2	Meningkatnya volume penjualan produk lokal	Pertumbuhan penjualan pelaku usaha lokal	10%
3	Meningkatnya pemanfaatan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Persentase resi gudang yang diterbitkan	75%
JF ANALIS PERDAGANGAN			
1	Terlaksananya Sosialisasi perizinan usaha	Persentase peserta dengan nilai post test > pre test	90%
2	Terlaksananya proses rekomendasi izin usaha perdagangan	persentase rekomendasi izi usaha yang diterbitkan	100%
3	Terlaksananya fasilitasi promosi produk lokal	Peningkatan volume penjualan produk yang dipromosikan	10%
4	Terlaksananya pembinaan pemasaran produk	Peningkatan penjualan pada pelaku usaha yang dibina	10%
5	Terlaksananya sosialisasi sistem resi gudang	Persentase peserta sosialisasi yang akan menyimpan di gudang	50%
JF PENGAWAS PERDAGANGAN			
1	Terlaksananya pengawasan tertib usaha	Persentase pengawasan izin usaha	100%
2	Terlaksananya pengawasan resi gudang	Persentase pengawasan resi gudang	100%
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN			
1	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrolagian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	73,94%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
JF. PENERA			
1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	60%
2	Terlaksananya Tera/ Tera Ulang Alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera sesuai standard	100%
3	Terlaksananya kalibrasi peralatan standard kemetrolgian	Persentase alat kemetrolgian yang mendapat sertifikat kalibrasi	100%
JF. PENGAWAS KEMETROLOGIAN			
1	Meningkatnya pengawasan kemetrolgian	Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP	100%
		Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan	50%
2	Terlaksananya pembinaan kemetrolgian	Persentase peserta pembinaan yang tertib ukur	100%
BIDANG STABILISASI DAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
1	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	86 IKM
2	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga	1%
3	Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	90%
4	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	100%
JF. ANALIS PERDAGANGAN			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalnya penataan pedagang dalam pemanfaatan toko di pasar	Persentase toko yang dimanfaatkan	80%
2	Terlaksananya registrasi ulang atas pemanfaatan toko	Persentase data pemanfaat toko yang aktif	75%
3	Tersedianya informasi harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase laporan harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	100%
4	Tersedianya sarana informasi tentang harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase sarana informasi yang terpasang di pasar yang diperbaharui	100%
5	Terlaksananya pasar murah	Persentase pasar murah yang dilaksanakan yang tepat sasaran	100%
6	Terlaksananya koordinasi ke Penyedia untuk Pelaksanaan Pasar murah	Persentase Tindak Lanjut koordinasi Penyedia Pasar Murah yang terlaksana	100%
7	terlaksananya pemeliharaan pasar	persentase pasar yang dipelihara	100%
JF. PENGAWAS PERDAGANGAN			
1	Terlaksananya pengawasan sarana pasar	persentase tindak lanjut atas pengawasan sarana pasar	100%
2	Terlaksananya koordinasi kebersihan dan keamanan	Persentase tindak lanjut koordinasi kebersihan dan keamanan	100%
3	Terlaksananya pengawasan atas pemungutan retribusi pasar	Persentase tindak lanjut pengawasan pemungutan retribusi pasar	100%
4	Meningkatnya persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi	100%
5	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SEKRETARIAT			
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Kinerja)	28,5 26 11 20
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 IKM
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%
SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		keuangan	
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
Pembona (IV/a)
NIP. 19670622 200801 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Perdagangan
Tahun Anggaran : 2023

Nomor	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Pelaku Usaha Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	Pertumbuhan Pelaku Usaha Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6,04%
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	10%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	60

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.588.104.343,00	
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	48.892.072,00	
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.382.621.954,00	
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	69.356.882,00	
5. Program Pengembangan Ekspor	102.706.431,00	
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	173.179.700,00	
7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	444.259.665,00	

Rantau, 18 September 2023



Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM



Pihak Pertama,

H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19670622 200801 1 008

BAB

**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang* merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yakni :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran Capaian Kinerja adalah untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04%	5,94%	98,34%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	10%	9,76%	97,60%

Adapun program-program yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran strategis dan kinerja utama sebagai berikut:

- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,94% berdasarkan data pelaku usaha yang diambil dari Sistem Online Single Submission (OSS) dan hasil pendataan pelaku usaha yang ada di kabupaten tapin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bentuk Badan Usaha	2023			2022		
		Jumlah Pelaku Usaha	Kepemilikan Izin Usaha		Jumlah Pelaku Usaha	Kepemilikan Izin Usaha	
			Ya	Tidak		Ya	Tidak
1	Perseroan Terbatas (PT)	218	209	9	206	206	-
2	Commanditaire Vennootschap (CV)	360	356	4	224	224	-
3	Perusahaan Umum (Perum)	3	3	-	-	-	-
4	Usaha Dagang (UD)	8	6	2	1	1	-
5	Perusahaan Perorangan	1305	1009	296	1369	1010	359
6	Badan Layanan Umum (BLU)	5	4	1	-	-	-
7	Badan Usaha Pemerintah	-	-	-	-	-	-
8	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	2	2	-	-	-	-
9	Koperasi	17	17	-	16	16	-
10	Persyarikatan atau Perkumpulan	3	3	-	3	3	-
11	Yayasan	1	1	-	-	-	-
12	Badan Hukum Lainnya	5	5	-	-	-	-
Jumlah		1927	1615	312	1819	1460	359
Rasio		100%	83,81%	16,19%	100%	80,26%	19,74%
Pertumbuhan		5,94%	10,62%	-13,09%			

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan sebesar 9,76%

berdasarkan data pasar tradisional yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasar	2023			2022		
		Jumlah Bangunan	Status Bangunan		Jumlah Bangunan	Status Bangunan	
			Layak	Tidak Layak		Layak	Tidak Layak
1	Pasar Binuang Baru	6	6	-	6	6	-
2	Pasar Hatungun	6	6	-	6	6	-
3	Pasar Batung	4	4	-	4	4	-
4	Pasar Margasari	4	4	-	4	-	4
5	Pasar Raya Rantau	4	4	-	4	4	-
6	Pasar Tambarangan	3	3	-	3	3	-
7	Pasar Bakarangan	1	-	1	1	1	-
8	Pasar Miawa	2	2	-	2	2	-
9	Pasar Keraton Rantau	13	10	3	13	9	4
10	Pasar Salam Babaris	1	1	-	1	1	-
11	Pasar Tatakan	2	1	1	2	1	1
12	Pasar Bungur	1	1	-	1	1	-
13	Pasar Muara Muning	4	3	1	4	3	1
Total		51	45	6	51	41	10
Persentase		100%	88,24%	11,76%	100%	80,39%	19,61%
Peningkatan			9,76%	-40,03%			

Tabel 3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
BIDANG PERIZINAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN					
1	Meningkatnya tertib usaha perdagangan	Tingkat tertib usaha	60%	50,70%	84,5%
2	Meningkatnya volume penjualan produk lokal	Pertumbuhan penjualan pelaku usaha lokal	10%	10%	100%
3	Meningkatnya pemanfaatan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Persentase resi gudang yang diterbitkan	75%	100%	133,33%
JF. ANALIS PERDAGANGAN					
1	Terlaksananya Sosialisasi perizinan usaha	Persentase peserta dengan nilai post test > pre test	90%	80%	88,89%
2	Terlaksananya proses rekomendasi izin usaha perdagangan	persentase rekomendasi izi usaha yang diterbitkan	100%	100%	100%
3	Terlaksananya fasilitasi promosi produk lokal	Peningkatan volume penjualan produk yang dipromosikan	10%	10%	100%
4	Terlaksananya pembinaan pemasaran produk	Peningkatan penjualan pada pelaku usaha yang dibina	10%	10%	100%
5	Terlaksananya sosialisasi sistem resi gudang	Persentase peserta sosialisasi yang akan menyimpan di gudang	50%	50%	100%
JF. PENGAWAS PERDAGANGAN					
1	Terlaksananya pengawasan tertib usaha	Persentase pengawasan izin usaha	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	Terlaksananya pengawasan resi gudang	Persentase pengawasan resi gudang	100%	100%	100%

Tabel 3.1.2 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Pengembangan Saran Distribusi Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
BIDANG STABILISASI DAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
1	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	86 IKM	76,68 IKM	89,16
2	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga	1%	0,06%	194%
3	Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	90%	88,24%	98,04%
4	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	100%	81,80%	81,80%
JF. ANALIS PERDAGANGAN					
1	Optimalnya penataan pedagang dalam pemanfaatan toko di pasar	Persentase toko yang dimanfaatkan	80%	60.73	659/1085

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	Terlaksananya registrasi ulang atas pemanfaatan toko	Persentase data pemanfaat toko yang aktif	75%	43,53%	58,04%
3	Tersedianya informasi harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase laporan harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	100%	100%	100%
4	Tersedianya sarana informasi tentang harga barang pokok dan penting (BAPOKTING)	Persentase sarana informasi yang terpasang di pasar yang diperbaharui	100%	100%	100%
5	Terlaksananya pasar murah	Persentase pasar murah yang dilaksanakan yang tepat sasaran	100%	100%	100%
6	Terlaksananya koordinasi ke Penyedia untuk Pelaksanaan Pasar murah	Persentase Tindak Lanjut koordinasi Penyedia Pasar Murah yang terlaksana	100%	100%	100%
7	terlaksananya pemeliharaan pasar	persentase pasar yang dipelihara	100%	100%	100%
JF. PENGAWAS PERDAGANGAN					
1	Terlaksananya pengawasan sarana pasar	persentase tindak lanjut atas pengawasan sarana pasar	100%	100%	100%
2	Terlaksananya koordinasi kebersihan dan keamanan	Persentase tindak lanjut koordinasi kebersihan dan keamanan	100%	100%	100%
3	Terlaksananya pengawasan atas pemungutan retribusi pasar	Persentase tindak lanjut pengawasan pemungutan retribusi pasar	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4	Meningkatnya persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	100%	100%	100%

- **Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar**

Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam pelayanan sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan
2	Kondisi bangunan pasar
3	Kejelasan Petugas Pelayanan
4	Kemampuan Petugas Pelayanan
5	Kebersihan lingkungan pasar
6	Kesopanan dan Keramahan Pelayan
7	Kewajaran Biaya Pelayanan
8	Kepastian Biaya Pelayanan
9	Kenyamanan Lingkungan
10	Keamanan Pelayanan

Jawaban atas setiap unsur pertanyaan diatas dikategorikan ke dalam empat tingkatan

kualitas pelayanan yaitu:

No	Jawaban	Bobot
1	Tidak baik	1
2	Kurang baik	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)} \times 25$$

Adapun kategorisasi nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,50 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan sample yang dijadikan responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun 2022 di Pasar Kabupaten Tapin ini berjumlah 110 orang, dengan hasil yang diperoleh dari survey menunjukan kinerja unit pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76,68 berada dalam interval 76,61 – 88,30 dengan mutu kepuasan B yang dikategorikan Baik, perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap pelayanan. Data olahan dari hasil survei dapat dilihat pada lampiran.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai terendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus tetap di pertahankan.

Survey kepuasan Masyarakat yang belum bisa mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat senilai 86. Adapun unsur yang perlu terus memperoleh perhatian untuk ditingkatkan, yaitu Kebersihan lingkungan pasar mendapatkan nilai terendah yaitu 2.82 Selanjutnya Keamanan pasar yang mendapatkan nilai 2,89 adalah nilai terendah kedua.

- **Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok**

Koefisien variasi tertinggi ditahun 2023 yaitu pada komoditas cabe rawit sebesar 0,06% (data perhitungan koefisien pada lampiran) dari target sebesar 1% dengan capaian sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = (1\% - (0,06\% - 1\%)/1\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 194 \%$$

NO	NAMA BAHAN POKOK	SATUAN	RATA-RATA	STANDAR DEVIASI	KOEFISIEN VARIASI
1	Beras Medium	1 ltr	4.500,00	-	-
2	Kacang kedelai	kg	20.000,00	-	-
3	Cabe Merah	kg	65.208,33	3.758,67	0,06
4	Cabe Rawit	kg	70.000,00	-	-
5	Bawang Merah	kg	29.208,33	1.370,26	0,05
6	Daging Ayam	kg	39.666,67	1.005,19	0,03
7	Daging Sapi	kg	159.375,00	765,47	0,00
8	Telur	kg	29.833,33	408,25	0,01
9	Ikan Kembung	kg	54.500,00	-	-
10	Minyak Goreng	1 ltr	21.333,33	204,12	0,01
11	Tepung Terigu	kg	13.250,00	-	-
12	Gula Pasir	kg	16.583,33	973,61	0,06
Koefisien Variasi Tertinggi di Triwulan IV Tahun 2023 yaitu pada Komoditas Gula Pasir dan Cabe Merah sebesar					0,06

- **Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak**

Indikator ini dihitung menurut jumlah aset gedung dan bangunan yang dikuasai dan terdapat pada Data Bangunan Pasar Tradisional Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

DATA BANGUNAN PASAR TRADISIONAL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

NO	NAMA PASAR	Lokasi	JUMLAH BANGUNAN	STATUS BANGUNAN	
				LAYAK	TIDAK LAYAK
1	Pasar Binuang Baru	Kecamatan Binuang	6	6	-
2	Pasar Hatungun	Kecamatan Hatungun	6	6	-
3	Pasar Batung	Kecamatan Piani Desa Batung	4	4	-
4	Pasar Margasari	Kecamatan Candi Laras Selatan	4	4	-
5	Pasar Raya Rantau	Kecamatan Tapin Utara Rantau	4	4	-
6	Pasar Tambarangan	Kecamatan Tapin Selatan	3	3	-
7	Pasar Bakarangan	Kecamatan Bakarangan	1	-	1
8	Pasar Miawa	Kecamatan Piani Desa Miawa	2	2	-
9	Pasar Keraton Rantau	Kecamatan Tapin Utara	13	10	3
10	Pasar Salam Babaris	Kecamatan Salam Babaris	1	1	-
11	Pasar Tatakan	Kecamatan Tapin Selatan	2	1	1
12	Pasar Bungur	Kecamatan Bungur	1	1	-
13	Pasar Muara Muning	Kecamatan Candi Laras Selatan	4	3	1
Total			51	45	6
Persentase			100%	88,24%	11,76%

- **Persentase penerimaan retribusi pasar**

Target pendapatan berupa retribusi pasar harian, sewa toko dan retribusi pelayanan UTTP ditargetkan sebesar Rp. 1.556.000.000,00 realisasi Rp. 1.272.795.141,00 (81,80%) dengan rincian sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN REALISASI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	75.000.000	73.355.500	-1.644.500	97,81%
2	Retribusi Pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha	369.000.000	439.020.000	70.020.000	118,98%
	a. Harian Toko dan Harian Pasar	369.000.000	439.020.000	70.020.000	118,98%

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%
	· Pasar Raya Rantau	127.500.000	200.740.000	73.240.000	157,44%
	· Pasar Keraton Rantau	100.000.000	82.620.000	17.380.000	82,62%
	· Pasar Binuang	114.000.000	128.018.000	14.018.000	112,30%
	· Pasar Margasari	10.000.000	14.000.000	4.000.000	140,00%
	· Pasar Tambarangan	7.500.000	3.642.000	-3.858.000	48,56%
	· Pasar Batung/Miawa	10.000.000	10.000.000	0	100,00%
3	Retribusi Penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakan	1.100.000.000	748.419.641	-351.580.359	68,04%
	a. Pasar Grosir/sewa toko	725.000.000	462.575.415	-262.424.585	63,80%
	· Pasar Keraton	300.000.000	74.016.000	-225.984.000	24,67%
	· Pasar Raya Rantau	300.000.000	255.768.665	-44.231.335	85,26%
	· Pasar Margasari	10.000.000	5.062.500	-4.937.500	50,63%
	· Pasar Binuang	115.000.000	108.843.750	-6.156.250	94,65%
	· Biaya Balik Nama		18.884.500	18.884.500	
	b. Tunggalan/Piutang Sewa toko	375.000.000	285.844.226	-89.155.774	76,23%
	· Pasar Keraton Rantau	175.000.000	79.518.000	-95.482.000	45,44%
	· Pasar Raya Rantau	200.000.000	187.568.726	-12.431.274	93,78%
	· Pasar Binuang	0	18.757.500	18.757.500	
4	Retribusi Penyewaan bangunan	12.000.000	12.000.000	0	
	· Sewa Tempat dari BPR selama 12 Bulan	12.000.000	12.000.000	0	
TOTAL SELURUHNYA		1.556.000.000	1.272.795.141	-283.204.859	81,80%

Tabel 3.1.3 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Kemetrolologi dan Pengawasan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN					
1	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrolologi dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	73,94%	58,71%	79,40%
JF. PENERA					
1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	60%	75,66%	126,09%
2	Terlaksananya Tera/ Tera Ulang Alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera sesuai standard	100%	100%	100%
3	Terlaksananya kalibrasi peralatan standard kemetrologia	Persentase alat kemetrolologi yang mendapat sertifikat kalibrasi	100%	100%	100%
JF. PENGAWAS KEMETROLOGIAN					
1	Meningkatnya pengawasan kemetrolologi	Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan	50%	21,35%	42,70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	Terlaksananya pembinaan kemetrolagian	Persentase peserta pembinaan yang tertib ukur	100%	100%	100%

- **Indeks tertib ukur**

Indeks tertib ukur merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian alat ukur yang digunakan dimasyarakat, Indeks tertib ukur ini juga merepresentasikan sebuah ukuran jaminan terhadap kuantitas yang diberikan kepada konsumen berdasarkan kesesuaian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Indeks tertib ukur ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ::

Persentase UTTP bertanda tera sah = $((519/686) \times 100\%) = 75,66\%$

Persentase kesesuaian BDKT = $((253/445) \times 100\%) = 21,35\%$

ITU = (Persentase UTTP ditera x 68,4%) + (Persentase kesesuaian BDKT x 31,6%)

ITU = $(75,66\% \times 68,4) + (21,35\% \times 31,6)$

ITU = $51,75 + 6,75$

ITU = 58,50

Keterangan :

ITU = Indeks tertib ukur

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Analisis realisasi dan capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan

rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja				Keterangan
			2023		2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04%	5,94%			IKU ditetapkan per 18 September 2023 sehingga tahun 2022 belum mengukur indikator tersebut sehingga belum terdapat realisasi 2022
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	10%	9,76%			
1	Meningkatnya tertib usaha perdagangan	Tingkat tertib usaha	60%	50,70%			IKU ditetapkan per 18 September 2023 sehingga tahun 2022 belum mengukur indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja				Keterangan
			2023		2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2	Meningkatnya volume penjualan produk lokal	Pertumbuhan penjualan pelaku usaha lokal	10%	10%			tersebut sehingga belum terdapat realisasi 2022
3	Meningkatnya pemanfaatan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Persentase resi gudang yang diterbitkan	75%	100%			
1	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrolagian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	73,94%	58,71			IKU ditetapkan per 18 September 2023 sehingga tahun 2022 belum mengukur indikator tersebut sehingga belum terdapat realisasi 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja				Keterangan
			2023		2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	86 IKM	76,68 IKM	79 IKM	76,70 IKM	
2	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga	1%	0,06%	1,5%	0,54%	
3	Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	90%	88,24%	85%	80,56%	
4	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	100%	81,80%	100%	97,21%	

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Analisis capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Tingkat Capaian %	Keterangan
			Target Rensta 2018-2023	Realisasi		
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	8%	7,55%	94,37%	IKU Sebelumnya
2	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		5,9%		IKU per 18 September 2023
3	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,5%	9,15%	73,2%	IKU Sebelumnya
4	Meningkatnya tertib usaha perdagangan	Tingkat tertib usaha		50,70%		IKU per 18 September 2023
5	Meningkatnya volume penjualan produk lokal	Pertumbuhan penjualan pelaku usaha lokal		10%		IKU per 18 September 2023
6	Meningkatnya pemanfaatan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Persentase resi gudang yang diterbitkan		100%		IKU per 18 September 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Tingkat Capaian %	Keterangan
			Target Rensta 2018-2023	Realisasi		
7	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	79 IKM	76,68 IKM	97,06%	IKU Sebelumnya
8	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	89%	88,24%	99,14%	IKU Sebelumnya
9	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1%	0,06	194%	IKU Sebelumnya
10	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar		76,68 IKM		IKU per 18 September 2023
11	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga		0,06%		IKU per 18 September 2023
12	Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik		88,24%		IKU per 18 September 2023
13	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar		81,80%		IKU per 18 September 2023
14	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	70%	75,66%	108,08%	IKU Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Tingkat Capaian %	Keterangan
			Target Renstra 2018-2023	Realisasi		
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%	IKU Sebelumnya
15	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrologian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur		58,71%		IKU per 18 September 2023

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian renstra tahun 2018-2023 tergambar pada tabel diatas, akan tetapi hanya membandingkan IKU sebelum perubahan. Per 18 september 2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil asistensi tim saki kabupaten tapin dengan evaluator kemenpan RB RI tentang penetapan pohon kinerja berdasarkan peraturan kemenpan RB Nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah daerah sehingga tidak bisa mebandingkan IKU dengan renstra 2018-2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung atau penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan perencanaan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang mendukung keberhasilan atau faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Bab III

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	ALTERNATIVE SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Masih banyaknya pemohon yang belum mengetahui pelayanan rekomendasi telah dilakukan di MPP sehingga harus bolak balik ke Dinas Perdagangan dan ke MPP	Sosialisasi dan publikasi informasi tentang keberadaan MPP untuk pelayanan rekomendasi perizinan	Pemanfaatan media sosial untuk publikasi informasi tentang keberadaan MPP untuk pelayanan rekomendasi perizinan sektor perdagangan
2	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Sistem Resi Gudang	Sosialisasi tentang pentingnya SRG	- Meningkatkan sosialisasi SRG - Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten tetangga untuk pemanfaatan Gudang SRG - Studi Tiru ke Daerah lain yang berhasil dalam pengelolaan Gudang SRG
3	Banyaknya fasilitas kredit dari lembaga keuangan lain	Kerjasama dengan lembaga keuangan sebagai jaminan dukungan kredit	Kerjasama dukungan kredit dari Bank Kalsel
4	Minimnya pengetahuan pelaku usaha lokal tentang prosedur ekspor.	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha lokal tentang prosedur ekspor.	Pembinaan pelaku usaha produk yang berpotensi ekspor
5	Produk lokal yang belum bisa memenuhi standar produk ekspor	Meningkatkan kualitas Produk lokal yang belum bisa memenuhi standar produk ekspor	Fasilitasi pelaku usaha memenuhi standar produk ekspor.
6	Terbatasnya kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor.	Terbatasnya kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor.	Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal peningkatan kualitas produk.

Bab III

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	ALTERNATIVE SOLUSI	TINDAKLANJUT
7	Terbatasnya narasumber dan praktisi yang dapat memberikan pembekalan kepada pelaku usaha dalam hal ekspor	- Inventarisir praktisi maupun akademisi yang dapat memberikan pembekalan pengetahuan ekspor. - Sharing pengetahuan sesama pelaku usaha yang produknya telah ekspor.	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi dalam hal pembinaan pelaku usaha produk ekspor.
8	- Terbatasnya even promosi yang dapat diikuti - Tumpang tindih jadwal pameran antar Even Organizer.	Inventarisir jadwal even dan EO pelaksana expo	Koordinasi dengan Even Organizer tingkat Nasional
9	Terbatasnya even promosi yang dapat diikuti	Inventarisir even promosi alternatif pada tingkat lokal	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan promosi produk lokal
10	Adanya kegiatan yang masih harus difasilitasi oleh pihak BSMLR III	Koordinasi dengan pihak BSMLR III	Mengajukan surat Permohonan Fasilitasi ke BSMLR III
11	Kurangnya tenaga Teknis untuk membantu Peneraan dan Pengawasan seperti Reparatur, juru timbang dll	Minta bantuan tenaga teknis ke BSML III	mengusulkan Penambahan Pegawai /PTT

Bab III

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	ALTERNATIVE SOLUSI	TINDAKLANJUT
12	Kurangnya sarana dan Prasarana Pendukung seperti Mobil Operasional Untuk kegiatan baik peneraan maupun pengawasan	Minjam Ke Perlengkapan	Mengusulkan Penambahan Anggaran bidang
13	- Masih Kurangnya Tenaga JF.Pengawas untuk Kab.Tapin dibandingkan jumlah potensi yang harus diawasi - Kegiatan pengawasan masih sangat sedikit untuk mencakup seluruh potensi yang ada	- Ada Penambahan Pegawai baik PNS/PTT - Adanya Penambahan untuk Kegiatan pengawasan	Mengusulkan Penambahan Anggaran bidang
14	Terbatasnya Anggaran untuk memperbaiki kondisi bangunan pasar yang kurang layak, sehingga mempengaruhi kenyamanan dalam aktifitas jual beli;	Mengajukan usul anggaran untuk perbaikan kondisi bangunan pasar yang kurang layak baik melalui APBD maupun DAK	1Melakukan pendataan dan pengawasan atas kondisi bangunan yang kurang layak dan serta kondisi kebersihan dan kenyamanan pasar
15	Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar	Melakukan sosialisasi dan melakukan penerapan pembayaran retribusi pasar secara online	membuat SOP tentang penagihan retribusi pasar

Bab III

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	ALTERNATIVE SOLUSI	TINDAKLANJUT
16	sebagian pada pasar tradisional tingkat desa belum mempunyai pengelola yang baik	melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar tingkat kecamatan dan desa	mendata jumlah pasar dan jumlah pengelolaanya
17	koefien variasi harga yang tertinggi adalah beras medium hal ini disebabkan produksi beras rendah, harga jual rendah di dalam daerah sehingga mengakibatkan para petani menjual keluar daerah karena harga yang lebih baik	melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif atas penjualan beras keluar daerah supaya kebutuhan beras dalam daerah terpenuhi dan pentingnya turut serta pemerintah daerah	Melakukan operasi pasar dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga dengan target 87 kali pelaksanaan
18	Pendistribusian Pupuk Bersubsidi kurang lancar dan terkonsentrasi pada triwulan III dan IV	Melakukan pemetaan masalah, melakukan pemantauan secara berkala tepat sasaran, melakukan razia di duga adanya penumpukan barang oleh pedagang dan selalu memonitor harga dan stock barang kebutuhan dan barang penting dengan harga yang wajar sesuai hukum penawaran / permintaan barang.	Bekerja sama dengan instansi terkait melakukan pemantauan harga dan stok barang di pasar sesuai rencana dan SOP yang berlaku.
19	Kurangnya juru pantau karena anggaran yang tersedia terbatas	Melakukan Usulan anggaran untuk juru pantau bapokting	Mengoptimalkan juru pantau yang ada

Bab III

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	ALTERNATIVE SOLUSI	TINDAKLANJUT
20	keterbatasan penyediaan barang yang disalurkan kemasyarakat	Melaksanakan operasi pasar dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)	Melaksanaan operasi pasar sebanyak 87 kali dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 49.100 orang /keluarga

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Dinas Perdagangan Kabupaten sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan efisien apabila hasil perhitungan semakin tinggi. Karena efisiensi di ukur dengan berdasarkan selisih Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan Realisasi Kinerja pada tingkat Realisasi anggaran yang sama.
2. Meningkatkan Realisasi Kinerja dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan Realisasi Anggaran
3. Menurunkan Realisasi Anggaran pada tingkatan Realisasi Kinerja yang sama
4. Menurunkan Realisasi Anggaran dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui hasil analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian 2023	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	98,34%	85,34%	13%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian 2023	Realisasi Anggaran	Efisiensi
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	97,60%	85,34%	12,26%
3	Meningkatnya tertib usaha perdagangan	Tingkat tertib usaha	84,5%	97,12%	-12,62%
4	Meningkatnya volume penjualan produk lokal	Pertumbuhan penjualan pelaku usaha lokal	100%	99,97%	0,3%
5	Meningkatnya pemanfaatan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Persentase resi gudang yang diterbitkan	133,33%	54,21%	79,12%
6	Meningkatnya kepatuhan tentang kemetrollogian dari pelaku usaha	Indeks tertib ukur	79,40%	97,58%	-18,18%
7	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks kepuasan masyarakat (pedagang) terhadap pengelolaan pasar	89,16%	75,33%	13,83%
8	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga	194%	87,86%	106,14%
9	Optimalisasi fasilitas sarana pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	98,04%	75,33%	22,71%
10	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	81,80%	75,33%	6,47%

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melaksanakan 7 program dengan 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.891.441.047,00 realisasi Rp 9.294.888.008,90 (85,34%) dengan sumber dananya dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023. Realisasi anggaran yang tidak mencapai

seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan, juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Dinas Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya mempunyai 7 (tujuh) program yaitu sebagai berikut :

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.673.336.359	5.374.983.557	298.352.802	94,74
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.149.750	2.132.850	16.900	99,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.149.750	12.132.850	16.900	99,86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.708.667.475	3.634.919.263	73.748.212	98,01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.697.884.955	3.624.670.813	73.214.142	98,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.482.564	3.978.400	504.164	88,75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.299.956	6.270.050	29.906	99,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	862.613.802	861.870.640	743.162	99,91

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.318.830	23.297.460	21.370	99,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.253.186	71.192.750	60.436	99,92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.768.000	6.768.000	0	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.350.446	97.192.800	1.157.646	98,82
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.562.798	21.519.950	42.848	99,80
	Penyediaan Bahan/Material	7.525.042	7.509.500	15.542	99,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.835.500	634.390.180	-554.680	100,09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.656.712	126.102.928	2.553.784	98,02
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.635.712	94.107.928	2.527.784	97,38
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.021.000	31.995.000	26.000	99,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.392.340	363.491.590	8.900.750	97,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.759.990	145.541.290	4.218.700	97,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.632.350	217.950.300	4.682.050	97,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.856.280	376.466.286	212.389.994	63,93

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.134.241	75.380.585	5.753.656	92,91
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000	20.018.568	481.432	97,65
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.712.080	15.000.000	712.080	95,47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	471.509.959	266.067.133	205.442.826	56,43
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	48.892.072	47.485.750	1.406.322	97,12
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	48.892.072	47.485.750	1.406.322	97,12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.892.072	47.485.750	1.406.322	97,12
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.379.709.938	3.192.199.072	1.187.510.866	72,89
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.258.640.136	3.192.199.072	1.066.441.064	74,96
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.141.933.962	1.114.583.153	1.027.350.809	52,04

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.116.706.174	2.077.615.919	39.090.255	98,15
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	121.069.802	106.983.700	121.069.802	88,36
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	121.069.802	106.983.700	14.086.102	88,37
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	69.356.882	60.935.500	8.421.382	87,86
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.999.952	14.910.000	89.952	99,40
	Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.999.952	14.910.000	89.952	99,40
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	54.356.930	46.025.500	8.331.430	84,67
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	39.384.130	34.275.500	5.108.630	87,03
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.972.800	11.750.000	3.222.800	78,48

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	102.706.431	102.478.000	228.431	99,78
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.706.431	102.478.000	228.431	99,78
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	8.466.350	8.425.000	41.350	99,51
	Pameran Dagang Nasional	43.850.647	43813000	37.647	99,91
	Pameran Dagang Lokal	50.389.434	50240000	149.434	99,70
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	173.179.700	168.981.879	4.197.821	97,58
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	173.179.700	168.981.879	4.197.821	97,58
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	148.211.237	144.640.829	3.570.408	97,59
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463	24.341.050	627.413	97,49
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	444.259.665	240.840.550	203.419.115	54,21
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	444.259.665	240.840.550	203.419.115	54,21

Nomor	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	444.259.665	240.840.550	203.419.115	54,21

BAB

IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) disusun dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin menyusun LKIP tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Perdagangan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan 7 program yang tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2023.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strengths*) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin berdasarkan capaian indikator kinerja utama Dinas Perdagangan yaitu Pertumbuhan pelaku usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan tingkat capaian 98,34% dan persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dengan tingkat capaian 97,60% sehingga dapat dikategorikan **Baik**, dengan realisasi keuangan tidak mencapai 100% yakni hanya mencapai 85,34%.

Pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun penyelenggaraan tugas secara struktural sebagian besar dapat berjalan dengan lancar, disamping evaluasi kegiatan yang telah

dilaksanakan sehingga dapat disinerjikan dengan langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama Intansi Terkait dan Lembaga/Perusahaan Swasta yang profesional dan sesuai dengan bidangnya.

Dari kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023 diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan ditahun 2024 sehingga dihasilkan kegiatan yang mengacu pada sasaran dan program yang bersifat transparan dan akuntabel.

Atas pencapaian terhadap beberapa program sasaran Dinas Perdagangan tersebut tidak lepas dari dukungan semua pihak, atas dukungannya diucapkan terimakasih. Semoga LKIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Perdagangan pada tahun-tahun berikutnya.

Rantau, 06 Februari 2024

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
NIP. 19670622 200801 1 008

**LAPORAN PELAKSANAAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PEDAGANG PASAR**

**DISUSUN OLEH :
DINAS PERDAGANGAN**



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat periode tahun 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yang juga akan sekaligus mendukung Visi kepala daerah yaitu: **"BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS"**.

Rantau , November 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M. IP
NIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGATAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1. PELAKSANAAN SKM.....	4
2.2. METODE PENGUMPULAN DATA.....	4
2.3. LOKASI PENGUMPULAN DATA	5
2.4. WAKTU PELAKSANAAN SKM	5
2.5. PENETAPAN JUMLAH RESPONDEN	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	7
3.1. JUMLAH RESPONDEN SKM.....	7
3.2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT.....	7
BAB IV.....	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1. ANALISIS PERMASALAHAN/KELEMAHAN DAN KELEBIHAN UNSUR LAYANAN	9
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT	9
4.3. TREN NILAI SKM	10

BAB V.....	12
KESIMPULAN.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Hasil Pengolahan Data
3. Dokumen yang menunjukan anggaran Survey

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 10 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Pembayaran Retribusi Pasar** : pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.
2. **Balik Nama Toko** : proses perubahan data kepemilikan dari pemilik lama menjadi atas nama pemilik baru.
3. **Tanggung Jawab Petugas** : Tanggung Jawab Petugas adalah Tanggung jawab dalam melakukan pelayanan.
4. **Kemampuan Petugas** : Kemampuan Petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
5. **Kebersihan Pasar** : Kebersihan Pasar adalah untuk menilai kegiatan pembersihan pasar yang dilakukan oleh petugas kebersihan.
6. **Kesopanan Petugas** : Kesopanan Patugas adalah cara petugas melayani masyarakat dengan baik dan ramah.

7. **Biaya/Tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
8. **Kesesuaian Biaya** : Kesesuaian Biaya adalah kesesuaian dengan biaya yang sudah dalam peraturan dan kesepakatan.
9. **Kenyamanan Pelayanan** : kenyamanan pelayanan adalah nyaman dalam memberi pelayanan.
10. **Keamanan Pelayanan** : Keamanan Pelayanan adalah keamanan lokasi pelayanan seperti tidak adanya gangguan dari pihak lain.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tapin pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dengan petugas survey mendatangi responden satu per satu. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hari Kerja
1.	Persiapan	18 s.d 19 September 2023	2
2.	Pengumpulan Data	20 s.d 28 September 2023 01 s.d 03 Oktober 2023	13
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	04 s.d 06 Oktober 2023	3
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	09 s. 12 Oktober 2023	4

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak agar nantinya bisa diperoleh hasil yang tidak ada rekayasa. Dalam penentuan responden terlebih dahulu ditentukan dengan cara menghitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Jumlah Responden} = (\text{Jumlah Pertanyaan Kuesioner} + 1) \times \text{Jumlah Pertanyaan}$$

$$\text{Jumlah Responden} = (10+1) \times 10$$

$$\text{Jumlah Responden} = 11 \times 10$$

$$\text{Jumlah Responden} = 110$$

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 110 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

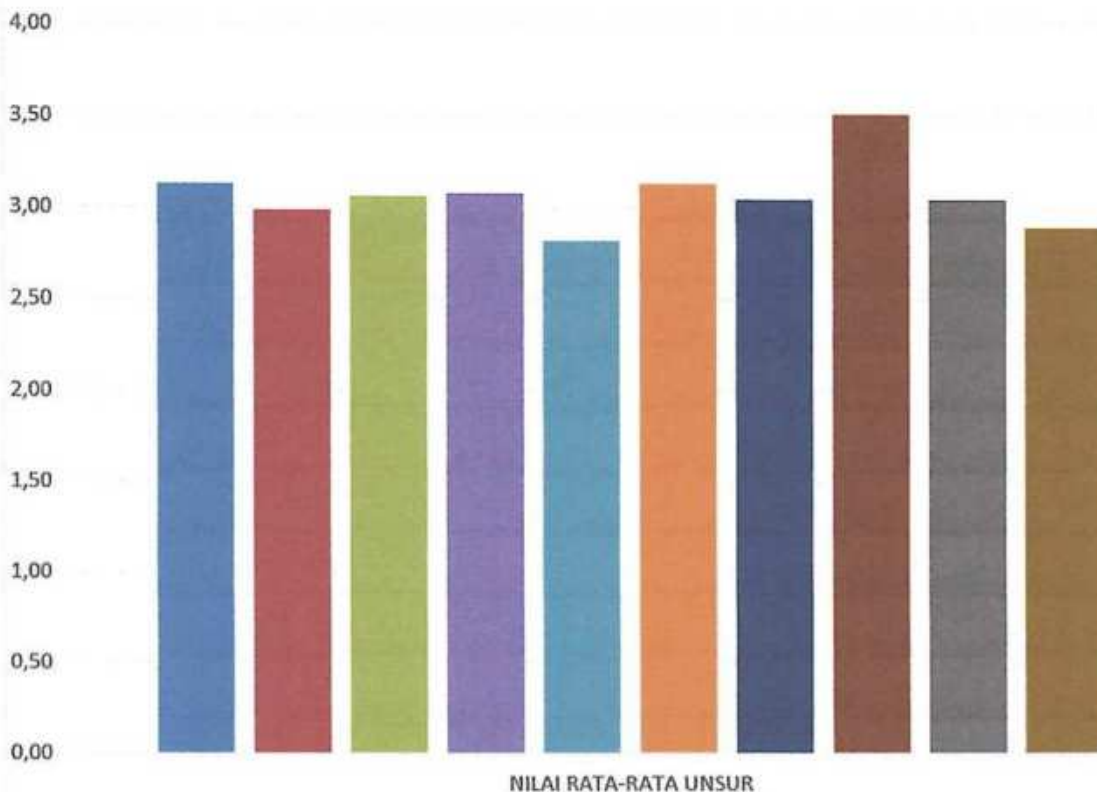
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	45	40,91%
		PEREMPUAN	65	59,09%
2	UMUR	17-30 Tahun	34	30,91%
		31-40 Tahun	30	27,27%
		41-50 Tahun	29	26,36%
		51-60 Tahun	15	13,64%
		61> Tahun	2	1,82%

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Nilai Rata - Rata unsur	3,15	2,98	3,05	3,01	2,95	3,16	3,05	3,26	2,99	3,10
Jumlah NRR Terbagi/Unsur	3,067									
IKM Unit Layanan	76,68 (B atau Baik)									

Nilai Rata - Rata Unsur



- Bagaimana Pendapat anda tentang kemudahan Pembayaran Retribusi Pasar di unit ini ?
- Bagaimana Pendapat Anda tentang kemudahan Balik Nama Toko di unit ini ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kebersihan lingkungan pasar saat ini ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan ?
- Bagaimana pendapat Saudara/i tentang keamanan pelayanan di unit ini

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kebersihan lingkungan pasar mendapatkan nilai terendah yaitu 2,82 Selanjutnya Keamanan pasar yang mendapatkan nilai 2,89 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kesesuaian biaya dengan nilai 3,51, serta kesopanan dan keramahan & kemudahan pembayaran retribusi yang memiliki nilai 3,15.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

No	Prioritas Unsur	Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kebersihan lingkungan pasar	Meningkatkan Kebersihan Pasar dengan cara : 1. mengawasi petugas kebersihan secara rutin 2. Menyediakan Bak Sampah 3. Menambah Petugas kebersihan	√	√	√	√	Dinas Perdagangan
2	Keamanan Pelayanan	1. Memaksimalkan petugas keamanan yang ada agar bisa selalu berpatroli disekitar lingkungan pasar	√	√	√	√	Dinas Perdagangan

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2023 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai September hingga Oktober 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas perdagangan Kabupaten Tapin, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 76,68. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas perdagangan Kabupaten Tapin menunjukkan konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2018 hingga 2023.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu : Kebersihan lingkungan pasar mendapatkan nilai terendah yaitu 2,82 Selanjutnya Keamanan pasar yang mendapatkan nilai 2,89 adalah nilai terendah kedua.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kesesuaian biaya dengan nilai 3,51, serta kesopanan dan keramahan & kemudahan pembayaran retribusi yang memiliki nilai 3,15.

Rantau, 06 November 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin.



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M. IP
NIP. 19670622 200801 1 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERDAGANGAN

JALAN : PEMBANGUNAN No.06 Telp. (0517) 31024 Tapin, Rantau 71111

**KUESIONER INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 14 TAHUN 2017**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat.

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat (Pedagang). Survei ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Dinas Perdagangan Kab. Tapin kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

PERHATIAN

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

I. DATA RESPONDEN (PEDAGANG)

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Nama Pasar :
5. Blok Toko/Kios :

II. DATA PENCACAH/ PENGUMPUL DATA

Nama :

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

1. Bagaimana Pendapat anda tentang kemudahan Pembayaran Retribusi Pasar di unit ini ?
 - a. Tidak mudah
 - b. Kurang mudah
 - c. Mudah
 - d. Sangat mudah
2. Bagaimana Pendapat Anda tentang kemudahan Balik Nama Toko di unit ini ?
 - a. Tidak mudah
 - b. Kurang mudah
 - c. Mudah
 - d. Sangat mudah
3. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan ?
 - a. Tidak bertanggung jawab
 - b. Kurang bertanggung jawab
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Sangat bertanggung jawab
4. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ?
 - a. Tidak mampu
 - b. Kurang mampu
 - c. Mampu
 - d. Sangat mampu
5. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kebersihan lingkungan pasar saat ini ?
 - a. Tidak bersih
 - b. Kurang bersih
 - c. Bersih
 - d. Sangat bersih
6. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?
 - a. Tidak sopan dan tidak ramah
 - b. Kurang sopan dan kurang ramah
 - c. Sopan dan ramah
 - d. Sangat sopan dan sangat ramah

7. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
 - a. Tidak wajar
 - b. Kurang wajar
 - c. Wajar
 - d. Sangat wajar
8. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan ?
 - a. Selalu Tidak sesuai
 - b. Kadang – kadang sesuai
 - c. Banyak sesuai
 - d. Selalu sesuai
9. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan ?
 - a. Tidak nyaman
 - b. Kurang nyaman
 - c. Nyaman
 - d. Sangat nyaman
10. Bagaimana pendapat Saudara/i tentang keamanan pelayanan di unit ini
 - a. Tidak aman
 - b. Kurang aman
 - c. Aman
 - d. Selalu aman

**PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG)
TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PER RESPONDEN**

SKPD
TAHUN

: DINAS PERDAGANGAN
: 2023

No Responden	Jenis Kelamin	Umur	Unsur yang dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	23	Perempuan	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
2	33	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
3	55	Laki - Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	39	Perempuan	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
5	34	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	42	Perempuan	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
7	48	Perempuan	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3
8	50	Laki - Laki	4	2	2	2	3	3	2	3	2	2
9	48	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
10	60	Laki - Laki	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3
11	38	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
12	50	Laki - Laki	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3
13	22	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
14	27	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
15	31	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
16	23	Laki - Laki	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2
17	36	Perempuan	4	3	2	3	3	3	3	2	2	2
18	33	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
19	42	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
20	48	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
21	53	Perempuan	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3
22	42	Laki - Laki	3	2	3	4	3	3	3	4	3	2
23	60	Perempuan	4	4	4	4	2	4	4	2	3	3
24	55	Perempuan	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3
25	53	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
26	50	Perempuan	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
27	42	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
28	53	Perempuan	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
29	76	Laki - Laki	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3
30	59	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
31	60	Laki - Laki	4	3	3	3	2	3	3	4	4	2
32	52	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
33	38	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
34	45	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
35	50	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
36	48	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
37	29	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
38	48	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
39	27	Laki - Laki	4	3	3	3	2	3	3	4	2	2
40	30	Perempuan	3	2	4	3	2	3	3	4	2	2
41	47	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2
42	35	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3
43	49	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
44	31	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
45	22	Laki - Laki	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3
46	35	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
47	45	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
48	45	Perempuan	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2
49	36	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
50	25	Perempuan	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3
51	26	Perempuan	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3
52	28	Perempuan	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3
53	26	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
54	23	Perempuan	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3

No Responden	Jenis Kelamin	Umur	Unsur yang dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
55	38	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
56	24	Laki - Laki	2	3	2	3	2	3	3	4	3	3
57	18	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
58	40	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
59	28	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
60	35	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
61	27	Perempuan	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
62	23	Perempuan	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4
63	31	Perempuan	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
64	33	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
65	40	Laki - Laki	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3
66	31	Perempuan	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2
67	26	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
68	22	Perempuan	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4
69	22	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	22	Laki - Laki	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3
71	40	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
72	24	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
73	48	Laki - Laki	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4
74	50	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	37	Perempuan	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
76	55	Perempuan	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
77	53	Laki - Laki	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
78	40	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
79	50	Laki - Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	62	Laki - Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	35	Laki - Laki	4	3	4	3	2	4	3	4	3	3
82	41	Laki - Laki	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
83	21	Perempuan	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3
84	30	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
85	48	Perempuan	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4
86	36	Perempuan	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
87	34	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	20	Perempuan	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2
89	21	Laki - Laki	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3
90	33	Perempuan	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
91	45	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
92	35	Laki - Laki	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3
93	21	Perempuan	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3
94	26	Laki - Laki	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
95	35	Perempuan	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3
96	37	Laki - Laki	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2
97	54	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	21	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	24	Laki - Laki	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3
100	45	Perempuan	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4
101	45	Laki - Laki	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
102	30	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
103	37	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
104	47	Perempuan	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3
105	21	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
106	52	Perempuan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

No Responden	Jenis Kelamin	Umur	Unsur yang dinilai									
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
107	43	Laki - Laki	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
108	49	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
109	20	Perempuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
110	56	Perempuan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3

[illegible]

**NILAI BOBOT JAWABAN RESPONDEN, NILAI PER UNSUR, NILAI RATA-RATA, NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
DAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG) PADA TAHUN 2023**

NO	UNSUR PELAYANAN	ALTERNATIF JAWABAN DAN BOBOT NILAI								JUMLAH NILAI		
		A	NU	B	NU	C	NU	D	NU	NILAI UNSUR	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Bagaimana Pendapat anda tentang kemudahan Pembayaran Retribusi Pasar di unit ini ?	0	0	7	14	82	246	21	84	344	3,13	0,313
2	Bagaimana Pendapat Anda tentang kemudahan Balik Nama Toko di unit ini ?	0	0	12	24	88	264	10	40	328	2,98	0,298
3	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan ?	0	0	8	16	88	264	14	56	336	3,05	0,305
4	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ?	0	0	4	8	94	282	12	48	338	3,07	0,307
5	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kebersihan lingkungan pasar saat ini ?	0	0	31	62	68	204	11	44	310	2,82	0,282
6	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	0	0	2	4	92	276	16	64	344	3,13	0,313
7	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kewajiban biaya untuk mendapatkan pelayanan?	1	1	7	14	88	264	14	56	335	3,05	0,305
8	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan ?	0	0	8	16	38	114	64	256	386	3,51	0,351
9	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan ?	0	0	10	20	85	255	15	60	335	3,05	0,305
10	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang keamanan pelayanan di unit ini	0	0	22	44	78	234	10	40	318	2,89	0,289
Jumlah NRR Terbagi/Unsur											3,067	
Indeks Kepuasan Masyarakat											76,68	
Mutu Pelayanan											B	
Kinerja Unit Pelayanan											Baik	



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023	

Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi	: 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 12.149.750
Jumlah 2024	: Rp. 15.750.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100 %	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% " Persentase efisiensi penggunaan anggaran " Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.596.727	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.149.750
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	10 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					11.596.727					12.149.750	553.023	
5.1	BELANJA OPERASI					11.596.727					12.149.750	553.023	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.596.727					12.149.750	553.023	
5.1.02.01	Belanja Barang					7.096.727					7.649.750	553.023	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.096.727					7.649.750	553.023	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.800.727					4.353.750	553.023	
	[#] Dokumen RKA, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD,LKIP dan PK, Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKAP, SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.800.727					4.353.750	553.023	
	[-] Belanja Penggandaan												
	Fotocopy Spesifikasi : 7771 Lembar	Lembar		387	0	3.007.377	9200 Lembar	Lembar		387	0	3.560.400	553.023

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jilid Spesifikasi :	50 Eksemplar	Eksemplar	4.515	0	225.750	50 Eksemplar	Eksemplar	4.515	0	225.750	0
	Jilid Spesifikasi :	20 Eksemplar / Buku	Buku	28.380	0	567.600	20 Eksemplar / Buku	Buku	28.380	0	567.600	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.296.000						0 (3.296.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Belanja Makan Spesifikasi :	80 Porsi	Orang	41.200	0	3.296.000	80 Porsi	Orang	41.200	0	0 (3.296.000)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0						3.296.000 3.296.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											
	Belanja Makan Spesifikasi :		Orang	0	0	0	80 Porsi	Orang	41.200	0	3.296.000 3.296.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.500.000						4.500.000 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					4.500.000						4.500.000 0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					4.500.000						4.500.000 0
	[#] Jasa Survey Kepuasan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000						4.500.000 0
	[-] Jasa Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang Pasar)											
	Jasa Survey Dinas Perdagangan Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	4.500.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	4.500.000 0	
Grand Total :						11.596.727	Grand Total :					12.149.750 553.023





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PERDAGANGAN

Jalan Pembangunan Nomor : 6 Telepon : (0517) 31024 Faksimile : 31024 Rantau
Kode Pos 71111 Email : disdag.tapin@gmail.com

REKAPITULASI PENGAWASAN SERAPAN PUPUK BERSUBSIDI BULAN JANUARI - DESEMBER
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Alokasi SK Dinas TA 2023			Serapan Pupuk Januari-Desember			
		a			b			Persentase
		UREA (Ton)	NPK (Ton)	Jumlah Total	UREA (Ton)	NPK (Ton)	Jumlah Total	
1	Triwulan I				1.275,00	1.330,05	2.605,05	21,29%
2	Triwulan II				913,98	1.017,60	1.931,58	15,79%
3	Triwulan III				153,73	115,66	269,39	2,20%
4	Triwulan IV				969,67	591,70	1.561,37	12,76%
Jumlah		7.262,19	4.972,47	12.234,66	3.312,38	3.055,01	6.367,39	52,04%
Sisa Alokasi (a - b)					3.949,81	1.917,46	5.867,27	47,96%

Rantau, 08 Januari 2024

Kepala Dinas



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M. IP
NIP. 19670622 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Pembangunan Nomor : 6 Telepon : (0517) 31024 Faksimile : 31024 Rantau
Kode Pos 71111 Email : disdag.tapin@gmail.com

KOEFISIEN VARIASI HARGA BARANG POKOK DAN PENTING
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

NO	NAMA BAHAN POKOK	SATUAN	TAHUN 2023												RATA-RATA	STANDAR DEVIASI	KOEFISIEN VARIASI
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	Beras Medium	1 ltr	7.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-	-
2	Kacang kedelai	kg	17.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
3	Cabe Merah	kg	70.000,00	47.625,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.625,00	65.208,33	3.758,67	0,06
4	Cabe Rawit	kg	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-
5	Bawang Merah	kg	38.000,00	40.000,00	39.125,00	37.500,00	41.700,00	42.500,00	42.500,00	40.125,00	31.125,00	29.250,00	27.250,00	31.125,00	29.208,33	1.370,26	0,05
6	Daging Ayam	kg	37.250,00	38.875,00	36.625,00	36.000,00	40.100,00	43.250,00	40.750,00	40.625,00	37.375,00	39.250,00	38.500,00	41.250,00	39.666,67	1.005,19	0,03
7	Daging Sapi	kg	150.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	158.125,00	160.000,00	160.000,00	159.375,00	765,47	0,00
8	Telur	kg	30.000,00	29.500,00	28.750,00	29.000,00	31.000,00	30.875,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	29.500,00	29.500,00	29.833,33	408,25	0,01
9	Ikan Kembung	kg	50.000,00	55.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	53.625,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	-	-
10	Minyak Goreng	1 ltr	21.000,00	21.000,00	23.750,00	25.000,00	25.000,00	23.125,00	22.500,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.000,00	21.333,33	204,12	0,01
11	Tepung Terigu	kg	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.250,00	-	-
12	Gula Pasir	kg	14.000,00	13.875,00	14.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.625,00	15.000,00	17.250,00	17.500,00	16.583,33	973,61	0,06
Koefisien Variasi Tertinggi di Triwulan IV Tahun 2023 yaitu pada Komoditas Gula Pasir sebesar															0,06		

Rantau, 05 Januari 2024
Kepala Dinas
H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.I.P.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670622 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERDAGANGAN

Jln. PEMBANGUNAN No. 06 Rantau Telp/ Fax (0517) 31024 Kode Pos 71111

Nomor : 800.1.5/004.1/Sekt-Disdag/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan LKIP 2023

Rantau, 30 Januari 2024

Kepada Yth,
1. Pejabat Esselon III dan IV
2. Pejabat Fungsional
3. Staf/ Pelaksana
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, maka dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Hari/ Tanggal : Rabu / 31 Januari 2024
Waktu : 09:00 wita s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perdagangan Kab. Tapin

Demikian disampaikan, mengingat pentingnya rapat tersebut Bapak/Ibu dapat menghadirinya, atas kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

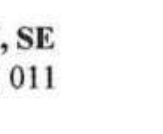
Ditandatangani secara Elektronik oleh :
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin

H. Sugian Noor, S.Hut, M.M, M.I.P.
Pembina Tk. I / (V/b)
NIP. 19670622 200801 1 006



DAFTAR HADIR RAPAT
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2023

Hari/ Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
 Jam : 09:00 Wita s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Perdagangan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sugian Noor	Ka. Disdag	
2	M. Z. Walid R.	Sekretaris Disdag	
3	Abdumad Janir	Kabid P3	
4	Rosyo Ifransyah	Kasub Pen. Pen	
5	Milih Noor	Analisis Perdagangan	
6	Dhony.	— " —	
7	Kiftiah	St. Pengawas Kereta	
8	FERRINDA RIBHA ADITUN	STAF PTT	
9	MUSLEHANI / S. SAS	Kepabkang ungu	
10	Nori Laila Suryani, SE	STAF	
11	Ellysa Rayana	Staf	
12	M. Abdul Jodid	STAF PTT	
13	Syafvani	Pennera	
14	NUR Hayati	STAF	
15	Noor Hamida	Subid metrologi	
16	Icha Wahyut.	St Pengawas perdagangan	

Pembuat Daftar,


ROSYID IFRANSYAH, SE
 NIP. 19850221 201001 1 011

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 31 Januari 2024
Waktu : 09:00 wita s.d selesai
Tempat : Kantor Dinas Perdagangan Kab. Tapin

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi dan seluruh Staf, dalam rapat ini membahas Penyusunan LKIP Tahun 2023 dan tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Individu Staf berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati bersama dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Maksud dari penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan LKIP yang memuat:

- Pada Bab I Pendahuluan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
- Pada Bab II Perencanaan Kinerja diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Sistematisasi uraian pada Bab II antara lain memuat sejumlah isu berikut: a) Telaah visi dan misi kepala daerah, b) Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan, dan c) Perjanjian Kinerja;
- Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya penjelasan secara sistematis terkait perbandingan data kinerja secara memadai, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
- Pada Bab IV Penutup diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian notulen ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, 31 Januari 2024

Notulis,



RAHMAN HIDAYAT, S. Kom
NIP. -

DOKUMENTASI FOTO
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2023



DOKUMENTASI FOTO
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2023

